



KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN



2022 LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gedung J Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan



komisiinformasisulsel



Komisi Informasi Prov Sulsel



Ki Prov Sulsel



Ki.Sulsel@gmail.com

KATA PENGANTAR



Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) telah menegaskan bahwa “keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.” Maka dalam rangka tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KIP, berfungsi untuk menjalankan UU KIP, seyogyanya menjadi lembaga yang dapat menjadi rujukan Badan Publik di Sulawesi Selatan atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Pasal 28 Ayat 2 UU KIP). Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yaitu menyampaikan dan membuka seluas-luasnya laporan

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan kepada publik. Kami sangat menyadari bahwa kinerja suatu lembaga dapat dilihat dan diukur dari laporan yang diterbitkannya. Oleh karena itu, dari laporan ini publik dapat menilai secara langsung capaian dan kinerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Perlu dilaporkan bahwa penghujung tahun 2023, merupakan tahun pergantian anggota Komisi Informasi Provinsi periode 2019 – 2023. Hal-hal yang dilaporkan pada laporan ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dalam menerima dan penyelesaian sengketa informasi publik, meningkatkan keterbukaan informasi publik dan penguatan kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya melaksanakan yang sudah ditetapkan pada rencana strategi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019 – 2023 untuk indikator capaian 2022. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Tak lupa ucapan termakasih dan penghargaan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat menjadi lembaga yang terus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik dan memberikan jaminan terhadap hak masyarakat atas akses informasi publik.

Makassar Februari 2022

Komisi Informasi Sulawesi Selatan
Ketua,

PAHIR HALIM

Daftar Isi



Komisi Informasi
Provinsi Sulawesi Selatan

Home

Profil

Publikasi

PPID

Login



Buka Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu !!!



Selamat Datang di Website
Komisi Informasi



MONEV



PUTUSAN



SIMSI

Pendahuluan	1
Penyelesaian Sengketa Informasi	7
Penguatan Kelembagaan	16
Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE)	31
Penguatan Keterbukaan Informasi Desa	36
Secretariat Komisi Informasi Sulsel	40
Penutup	43

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan | **Laporan Tahunan 2022**

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai berlaku secara efektif pada 30 April 2010. UU KIP memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 40. Bahwa "Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini". Berdasarkan Pasal 24 ayat (3), Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Dalam Pasal 1 angka 4 Bab Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Adapun tugas Komisi Informasi Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu:

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1813/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019, Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019 – 2023



 *Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023*

Untuk mendukung kerja-kerja ketiga bidang Komisi Informasi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi didukung oleh Sekretariat Komisi Informasi yang bertanggungjawab dalam mengatur Tatakelola Administrasi, dan Keuangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Uraian lengkap laporan kinerja ini, disusun berdasarkan kegiatan, dan detail dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

VISI



MISI



VISI

“Terwujudnya masyarakat informasi yang inklusif, partisipatif dan pemerintah terbuka di Sulawesi Selatan”

Pencapaian visi ini diwujudkan dalam 3 (tiga) sasaran utama:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik;
2. Masyarakat informatif yang inklusif dan partisipatif;
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.

1. Penguatan kelembagaan KI Sulsel menjadi lembaga mandiri, profesional dan kredibel;
2. Mengembangkan sistem manajemen teknologi informasi dalam keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan sosialisasi, edukasi dan advokasi terkait keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) badan publik terkait keterbukaan informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non-litigas

MISI

PROFIL

KOMISIONER

Lahir di Pinrang, 24 Desember 1962. Pahir Halim menamatkan pendidikan S1 pada tahun 1988 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Pria yang menjabat sebagai sebagai Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 periode ini (2015-2019 dan 2019-2023), pernah menjadi Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M) Sulawesi Selatan (1988-1996), Koordinator Eksekutif Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Nonpemerintah (FIK-ORNOP) Sulawesi Selatan (2000-2003), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar periode 2003-2008, dan Konsultan Komunikasi PDAM Kota Makassar (2009-2014).

Pahir Halim juga pernah aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar (1986-1988) dan Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (kahml) Wilayah Makassar (2014 - sekarang).

PAHIR HALIM

Ketua Komisi Informasi Prov. Sulsel



Andi Tadampali terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2023. Pada tanggal 6 Maret 1965, ia lahir di Palopo. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang pada tahun 1989.

Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Karya Cipta Indonesia (2002-2004), Penyiar dan Jurnalis Radio Mercurius Makassar (1989-2019), Direktur Radio Mercurius Makassar (2012-2019) dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2004-2007.

Ia juga memiliki beberapa aktivitas organisasi, yaitu: Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (1986-1987), Anggota Desk Pilkada Sulawesi Selatan dan Ketua Asosiasi Praktisi Radio Siaran Indonesia (APRASI) (2014 - sekarang).

ANDI TADAMPALI

Wakil Ketua Komisi Informasi Prov. Sulsel

Benny Mansjur menjabat sebagai Ketua Bidang Kelembagaan. Pria kelahiran 3 April 1963 di Makassar, menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil pada tahun 1991 dan pendidikan S2 Jurusan Teknik Sipil dalam Bidang Perencanaan Prasarana di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2003.

Sebelumnya ia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai mengabdikan diri di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku sebagai PJ. Asisten Pengawasan Teknis P3T-Nas dan P3T-Prov. Maluku (1992-1995), Pemimpin Proyek IPJP Maluku Tengah V (1995-1997) serta Pemimpin Bagian Proyek Pembangunan Jalan Halmahera Tengah I Kanwil PU Maluku (1997-2000). Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang, ia pernah menjadi Kepala Seksi Jalan (2001-2005), PLTG Kepala Bidang Praswil (2004), PJ. Kepala Bidang Praswil (2005-2008) dan Sekretaris Dinas (2008-2010). Lalu ia menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang (2010-2019). Akhir karirnya sebagai ASN, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Enrekang (2019). Selain itu, ia berperan sebagai *Trainer* (Narasumber) Pelatihan PBJ LKPP (2013-2019), Pemberi Keterangan Ahli PBJ LKPP (2013-2019), *Advisor Probity Advice* LKPP (2013-2019) dan Sekretaris Pokja PBJ Program Pendampingan SIPS CIDA-KPK (2012-2013).

BENNY MANSJUR

Koordinator Bidang Kelembagaan



Khaerul Mannan, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa. Lulusan S3 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, lahir di Sidrap pada tanggal 16 Juli 1970.

Ia pernah bekerja sebagai Advokat PERADI (1995-2019), Aktivis LSM YLP2EM (1997-2019) dan Dosen STIH AMSIR Parepare (2000-2019). Ia juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare (2003-2008), Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare (2008-2013), Anggota Panwaslu Kota Parepare (2009), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (2013-2018) dan Tim Pemeriksa Daerah TPD-DKPP (2014-2018).

Ia juga tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Kota Parepare, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Sulawesi Selatan, Pengurus PD Muhammadiyah Kota Parepare dan PSSI Kota Parepare Komisi Disiplin.

KHAERUL

Koordinator Bidang ASE

Komisioner KI Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan seorang advokat publik yang lebih dikenal dalam kiprahnya memberikan bantuan hukum gratis kepada klien disabilitas, Anak dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraih penghargaan Mahasiswa Berprestasi dan lulus Cum Laude dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sejak di bangku kuliah Fauziah sudah berprofesi sebagai broadcaster dan jurnalis di sejumlah televisi, diantaranya MetroTV hingga menempati posisi Kepala Biro MetroTV Makassar sebelum berkhidmat di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2014 dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2019.

Berprofesi sebagai jurnalis di manca negara melalui beasiswa PPIA -VoA di Washington DC Amerika Serikat memperkaya pengalaman hidup dan wawasan Ibu satu orang putri ini.

Berbagai pengalaman tersebut pula yang mengantarkan Fauziah kerap kali didapuk menjadi pelatih pada kegiatan yang digelar International Republican Institute (IRI) antara lain training Kepemimpinan Politik Perempuan dan Campaign Track Training dengan peserta dari Kawasan Timur Indonesia.

"Berusaha senantiasa bermanfaat bagi orang lain dan berkarya semaksimal mungkin di ladang pengabdian manapun" merupakan nilai yang ia amalkan di kesehariannya.



FAUZIAH ERWIN

Koordinator Bidang ASE



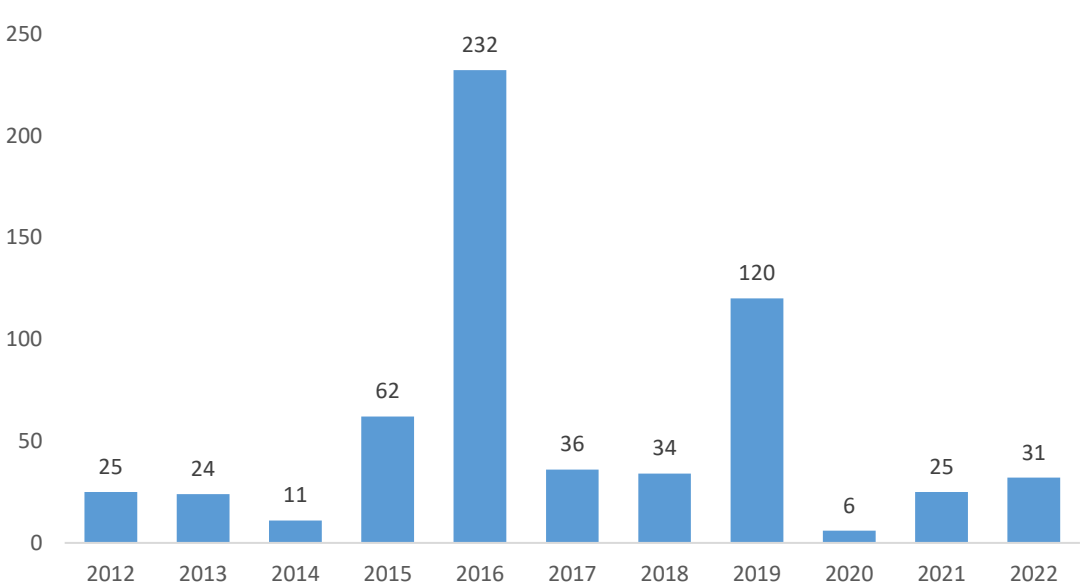
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Dalam menjalankan tugasnya, wewenang Komisi Informasi meliputi penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Merujuk pada pasal 26 UU KIP, Komisi Informasi berwenang memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.



 Dokumentasi Sidang Ajudikasi Nonlitigasi

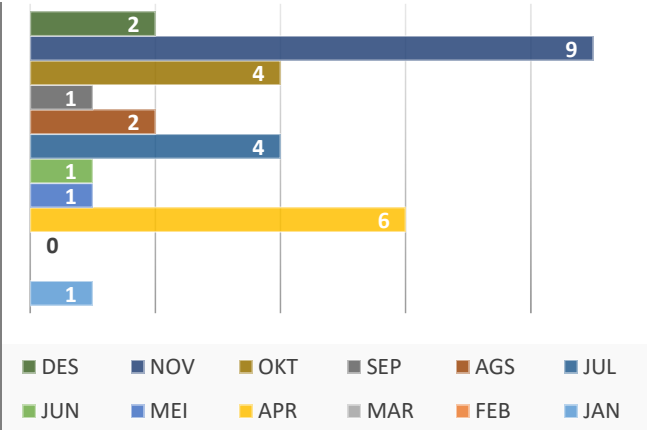
Sejak terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 s/d 2022 tercatat sebanyak 606 registrasi permohonan, yang sudah diselesaikan sebanyak 584 register permohonan, sehingga masih tersisa sebanyak 22 Registrasi permohonan yang masih dalam proses.



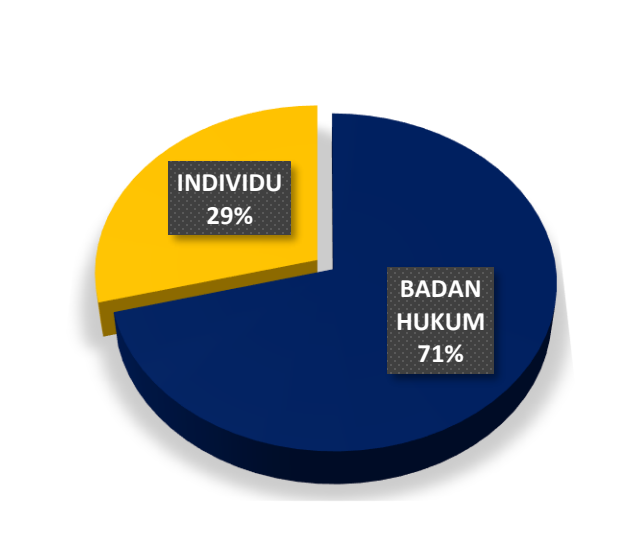
PERMOHONAN

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

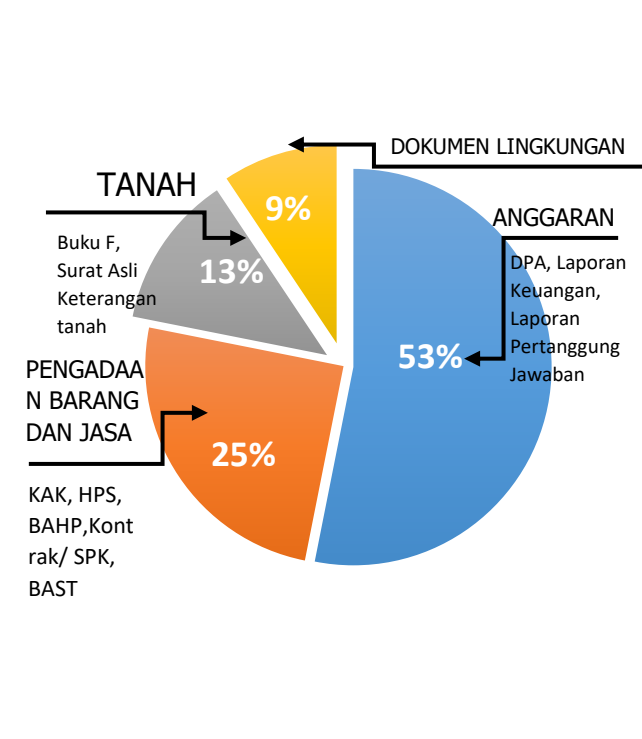
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2022 ini sebanyak 31 permohonan. Detail permohonan sengketa tersebut, setiap bulan nya dapat dilihat sebagaimana pada grafik disamping



Permohonan informasi Publik yang diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kategori jenis Pemohon yaitu Individu dan Badan Hukum. Dari 31 Permohonan yang diterima, Pemohon Badan Publik lebih banyak mengajukan sengketa dengan persentase 69% dan 31% permohonan yang diajukan oleh Individu



Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa informasi tahun 2022, informasi yang paling banyak menjadi obyek sengketa yaitu terkait Anggaran seperti (DPA, Laporan Keuangan, LHP, laporan pertanggung jawabana kinerja), dengan persentase 48 %, Informasi tentang Pendidikan seperti Laporan Penggunaan Dana Bos sebanyak 32%, Pengadaan Barang dan Jasa dengan persentase 4%, Tanah 12%, dan Data Aset 4%.

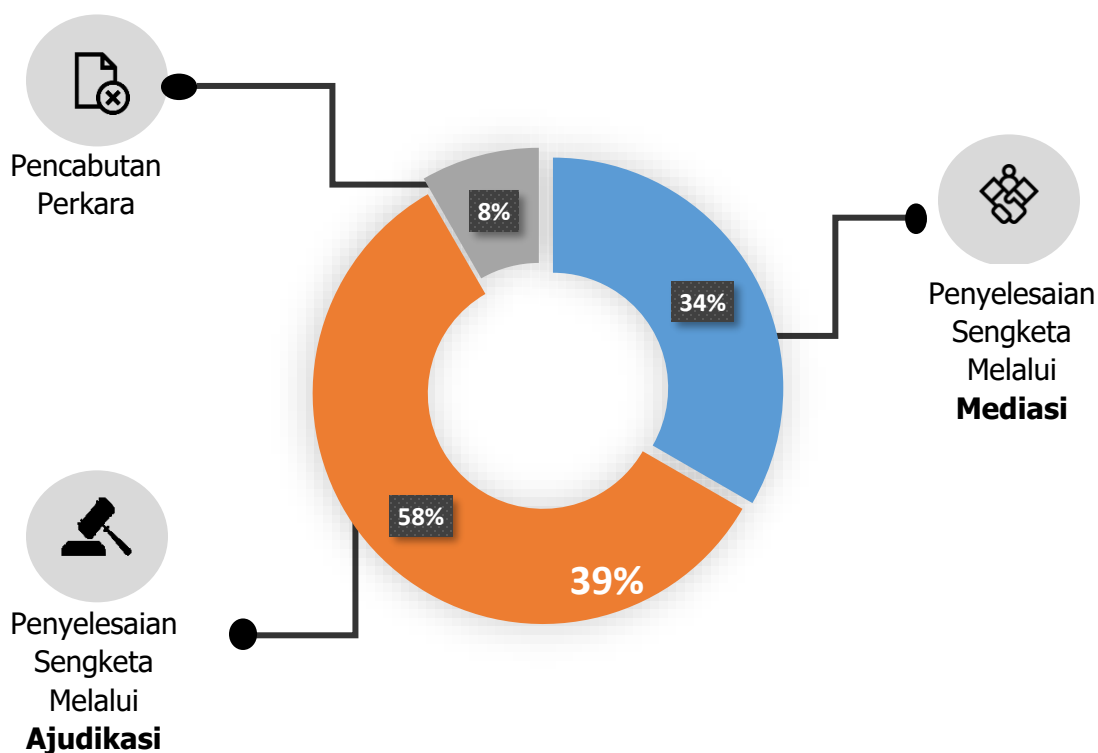


Dari tahun 2012 sampai tahun 2022 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 584 register permohonan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi atau melalui Mediasi, Vexatious Request dan melalui proses pencabutan sengketa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Penyelesaian Sengketa				Sementara Proses
			Mediasi	Ajudikasi	Pencabutan Sengketa	Vexatious	
1	2012	25	24	1	-	-	-
2	2013	24	18	6	-	-	-
3	2014	11	9	2	-	-	-
4	2015	62	20	42	-	-	-
5	2016	232	11	8	213	-	-
6	2017	36	20	7	9	-	-
7	2018	34	-	32	2	-	-
8	2019	120	5	14	27	74	-
9	2020	6	-	3	3	-	-
10	2021	25	9	13	2	-	1
11	2022	31	4	6	-	-	21
JUMLAH PSI			120	134	256	74	22
TOTAL KESELURUHAN PSI					584		

Sementara untuk tahun 2022 sengketa informasi yang diselesaikan sebanyak 24 registrasi Permohonan yang merupakan sengketa dari tahun sebelumnya sebanyak 14 registrasi permohonan dan 10 register permohonan tahun 2022 dan sepanjang tahun 2022 sebanyak 38 registrasi sengketa yang ditindaklanjuti.

Dari 24 registrasi sengketa informasi yang diselesaikan di tahun 2022, sengketa informasi yang diselesaikan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi sebanyak 14 registrasi atau dengan persentase 58% Mediasi sebanyak 8 registrasi atau dengan persentase 34% dan pencabutan sengketa sebanyak 2 sengketa atau dengan persentase 8%.



Grafik 4 : Penyelesaian sengketa tahun 2022

Upaya Hukum atas Putusan Komisi Informasi

Ditahun 2022 terdapat 1 registrasi sengketa yang di ajukan banding ke Pengadilan oleh Termohon.

NO	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	KETERANGAN
1	008/V/KI.SS-PS/2022	H. Andi Syamsu Adris . B	Kantor Pertiinan Kabupaten Bone	Termohon banding ke Pengadilan

Kegiatan Bidang PSI

Selama tahun 2022 bidang Penyelesaian SengketaInformasi memiliki kegiaian sebagai berikut :

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	LOKASI
1	07 Januari 2022	Sidang Pembuktian Lanjutan antara Sudirman melawan Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
2	07 Januari 2022	Sidang Pembuktian Lanjutan antara Sudirman melawan Pemerintah Desa Alenangka Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
3	28 Januari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

4	28 Januari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LSM Lintas Pemburu Keadilan melawan SMK Negeri 4 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
5	04 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal kedua antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
6	10 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan Q, SE melawan PT. Pertamina Regional VII	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
7	15 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara the grEEen Indonesia melawan Dinas Kesehatan Kab. Pinrang	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
8	15 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara the grEEen Indonesia melawan Sekda Kabupaten Pinrang	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
9	15 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara the grEEen Indonesia melawan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
10	16 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 17 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
11	16 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA) Wilayah Sul-Sel melawan Puskesmas Pertiwi	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
12	18 Februari 2022	Sidang Pemeriksaan Awal kedua antara Abdul Rahman melawan Kelurahan Tamalanrea	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
13	15 Maret 2022	Sidang Pemeriksaan Awal kedua antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 17 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
14	15 Maret 2022	Sidang Pembuktian Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
15	16 Maret 2022	Sidang Pemeriksaan Setempat antara Abdul Rahman melawan Kelurahan Tamalanrea	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
16	16 Maret 2022	Sidang Pembuktian antara the grEEen Indonesia melawan Dinas Kesehatan Kab. Pinrang	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
17	28 Maret 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara Sudirman melawan Kelurahan Sangiasserri	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

18	28 Maret 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara Sudirman melawan Pemerintah Desa Alenangka	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
19	29 Maret 2022	Sidang Pemeriksaan Awal kedua antara Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA) Wilayah Sul-Sel melawan Puskesmas Pertiwi	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
20	05 April 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan Q, SE melawan PT. ASBARI (Persero)	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
21	06 April 2022	Sidang Pembuktian antara Muh. Ridwan. Q S melawan SMA Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
22	06 April 2022	Sidang Pemeriksaan Awal ketiga antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 17 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
23	12 Mei 2022	Sidang Pembuktian antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
24	12 Mei 2022	Sidang Pembuktian antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 17 Makassar	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
25	12 Mei 2022	Sidang Pembuktian antara Abdul Rahman melawan Kelurahan Tamalanrea	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
26	12 Mei 2022	Mediasi antara Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA) Wilayah Sul-Sel melawan Puskesmas Pertiwi	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
27	19 Mei 2022	Sidang Pembuktian antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
28	19 Mei 2022	Sidang Pembuktian antara Muh. Ridwan Q, SE melawan SMA Negeri 17 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
29	19 Mei 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan. Q SE melawan SMA Negeri 5 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
30	09 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LSM – KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi) melawan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OPU)	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
31	09 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LSM Lintas Pemburu Keadilan melawan SMK Negeri 4 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

32	09 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara H. ANDI SYAMSU ADRIS . B melawan	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
33	10 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh Ridwan Q, SE melawan PT Sucofindo (Persero)	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
34	10 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan Q, SE melawan PT. Pertamina Regional VII	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
35	16 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNAL) Celebes melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
36	17 Juni 2022	Mediasi antara LSM-Lintas Pemburu Keadilan melawan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 04 Makassar	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
37	17 Juni 2022	Mediasi Antara Muh. Ridwan Q, SE melawan PT. Pertamina Regional VII	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
38	20 Juni 2022	Sidang Pemeriksaan Awal ke empat antara Muh. Ridwan Q, SE antara PT. Sucofindo (Persero) Cab. Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
39	04 Juli 2022	Mediasi antara H. Andi Syamsu Adris B melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
40	07 Juli 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LSM – KAPAK (Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi) melawan Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
41	11 Juli 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNAL) Celebes melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
42	18 JULI 2022	Mediasi antara Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNAL) Celebes melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan	Ruang Sekeratariat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
43	04 Agustus 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNAL) Celebes melawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

44	05 Agustus 2022	Sidang Pembuktian antara H. Andi Syamsu Adris B melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
45	11 Agustus 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan Q, SE melawan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
46	18 Agustus 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muh. Ridwan Q, S.E melawan Kecamatan Mariso Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
47	24 Agustus 2022	Mediasi kedua antara Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal) Celebes melawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur	Ruang Sekeretaryat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
48	26 Agustus 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara Abdul Rahman melawan Kelurahan Tamalanrea	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
49	26 Agustus 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara Muh. Ridwan Q, SE melawan PT. ASABRI	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
50	26 Agustus 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara antara Muh. Ridwan Q, SE melawan PT. Sucofindo (Persero) Cab. Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
51	13 September 2022	Sidang Pembuktian antara Perkumpulan Jurnalis Advokasi Lingkungan (JURNal) Celebes melawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
52	21 November 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara H. Andi Syamsu Adris B melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
53	21 November 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara Muh. Ridwan Q, SE melawan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
54	21 November 2022	Sidang Pembacaan Putusan antara Muh. Ridwan Q, SE melawan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
55	20 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Muhammad Iqbal Dinas PMD Kabupaten Wajo	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
56	20 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Hj. Nurhayati melawan BPN Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
57	20 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LSM KAPAK melawan Politeknik Penerbangan Politeknik	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

58	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
59	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan BPKAD Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
60	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
61	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan BPKAD Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
62	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas Sosial Kota Makassar	Ruang Sekeratariaat Komisi Informasi Prov. Sulsel Gedung J lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
63	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas pendidikan Kabupaten gowa	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
64	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas Sosial Kabupaten Gowa	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
65	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas PMD Kabupaten Gowa	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
66	21 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara LPA Wilayah SULSEL melawan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
67	22 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara Jurnal Celebes melawan Dinas ESDM Prov. Sulsel	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
68	22 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara AMPERAK melawan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
69	22 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara MUH. RIDWAN Q., S.E. melawan Dinas Kesehatan Kota Makassar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
70	22 Desember 2022	Sidang Pemeriksaan Awal antara AMPERAK melawan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar	Ruang Sidang Komisi Informasi Gedung A Lantai 5 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

Tabel 3 : Kegiatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengawal jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik. Dengan keberadaan Sekretariat yang *ex-officio* dan tetap menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Bidang Informatika. Penguatan KI secara kelembagaan tentu sangat besar ditopang oleh sinergitas bersama Pemprov Sulsel.

Salah satu tugas Bidang Kelembagaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 adalah melakukan koordinasi penguatan kelembagaan, melakukan Monitoring Evaluasi terhadap Keterbukaan Informasi Badan Publik serta apresiasi desa.

Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Bimbingan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi Publik di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Karenanya, sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b, Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Sekaitan dengan itu, untuk melihat sejauhmana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2022, dilaksanakan terhadap 3 (tiga) kategori Badan Publik yaitu Pemerintah Kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Sulsel dan Pemerintah Desa.

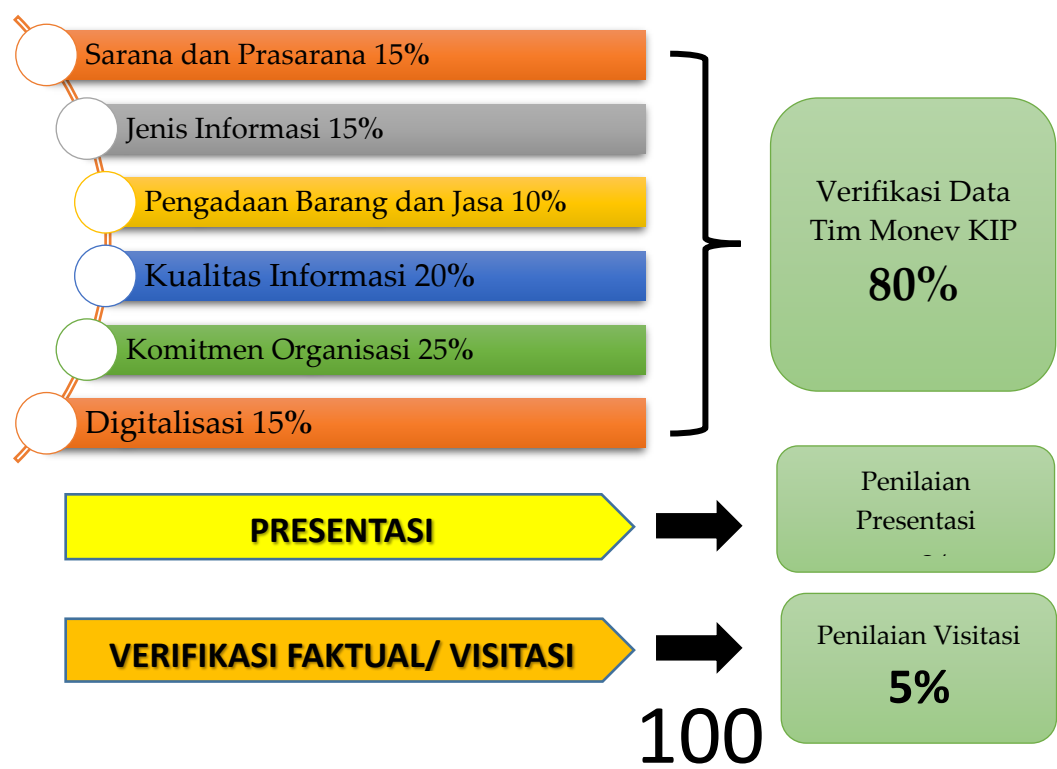
Monev Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov. Sulsel dan Badan Publik Pemerintah Kab/Kota se Sulawesi Selatan

Berbeda dari tahun sebelumnya dimana indikator penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik hanya menggunakan 4 Indikator sedangkan untuk tahun 2022 semenjak Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diterbitkan maka yang menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi adalah PERKI tersebut. PerKI ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi di level Badan Publik Pemerintah Kab/Kota dan Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov. Sulsel secara umum terbagi atas 6 indikator yakni:

1. Indikator Sarana dan Prasarana
2. Indikator Jenis Informasi
3. Indikator Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

- 4. Indikator Kualitas Informasi
- 5. Indikator Komitmen Organisasi
- 6. Indikator Digitalisasi

Pembobotan Penilaian Indikator Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :



Hasil dari penilaian 6 indikator dari pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri, Presentasi dan Verifikasi Faktual akan memberikan gambaran klasifikasi keterbukaan informasi Badan Publik tersebut. Untuk gambaran klasifikasi penilaian keterbukaan informasi publik dari perolehan penilaian, diklasifikasikan dalam 5 kategori sebagai berikut:

- a. Informatif (90-100)
- b. Menuju Informatif (80-89,9)
- c. Cukup Informatif (60-79,9)
- d. Kurang Informatif (40-59,9)
- e. Tidak Informatif (<39,9)

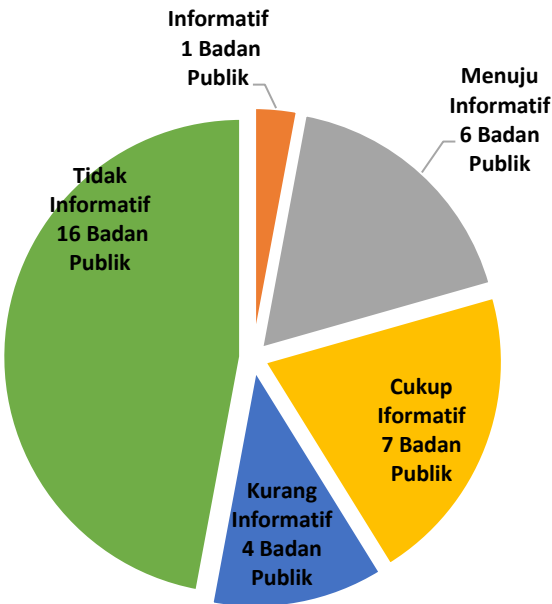
Secara umum dapat di laporkan bahwa dari hasil penilaian Verifikasi Kuesioner Penilaian Mandiri, Presentasi dan Verifikasi Faktual terhadap Badan Publik OPD lingkup Pemprov. Sulsel dan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota maka ditetapkan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun **2022** yaitu :

Monev Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. Sulsel

Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Badan Publik OPD tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dari 45 Organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikirimkan kuesioner hanya ada 36 OPD yang mengisi dan mengembalikan kuesiner, dan hanya ada 14 OPD yang ikut presentasi berdasarkan hasil verifikasi kuesioner yang telah diisi/ dikembalikan. Dari segi kuantitas monev keterbukaan informasi badan publik tingkat OPD provinsi ternyata hanya berkisar 31 % saja Badan Publik yang mengikuti proses Monev keterbukaan informasi ini. Ke-14 OPD tersebut adalah sebagai berikut:

No	Badan Publik
1	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
4	Dinas Perindustrian Prov. Sulsel
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel
8	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel
13	RSUD Haji Makassar Prov. Sulsel
14	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel

Dari hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, terlihat dengan jelas bahwa hasil evaluasi keterbukaan informasi badan publik di tingkat OPD provinsi Sulawesi Selatan masih jauh dari harapan walaupun sudah mengalami perubahan dimana sejak kegiatan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi belum ada OPD yang meraih kualifikasi Informatif namun ditahun 2022 ada dua Badan Publik OPD yang meraih kualifikasi Informatif, 1 Badan Publik Menuju Informatif, 4 Badan Publik Cukup Informatif, 5 Badan Publik Kurang Informatif dan 24 Badan Publik yang Tidak Informatif .



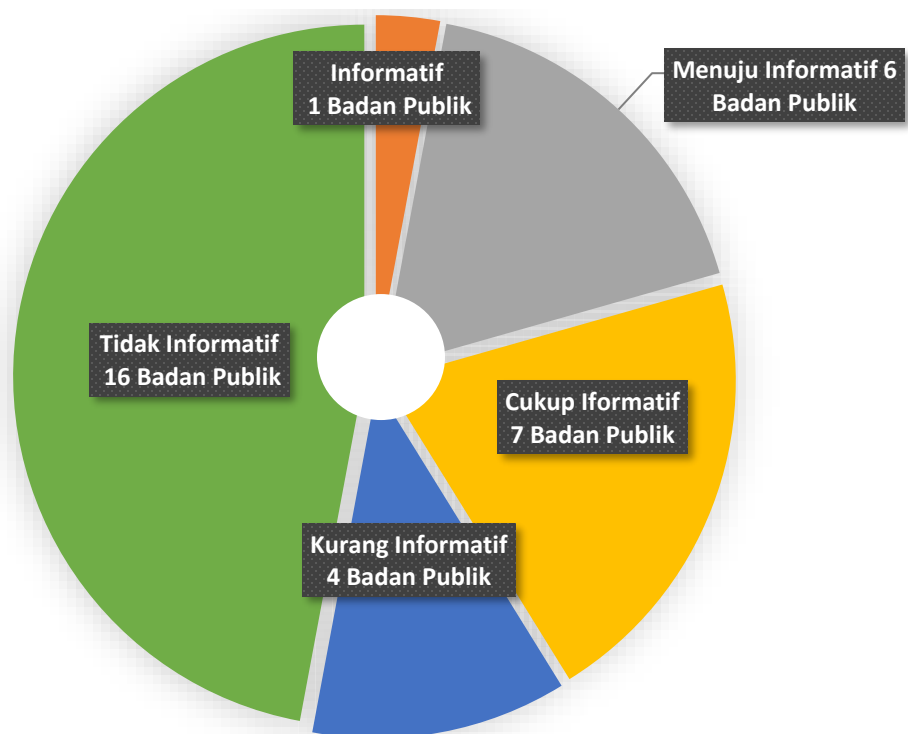
Keikutsertaan OPD dalam kegiatan Monev keterbukaan informasi Publik mengalami kenaikan dibandingkan dengan Monev tahun sebelumnya. Di tahun 2022 jumlah OPD yang turut serta dalam kegiatan Monev dengan mengisi/ mengembalikan kuesioner sebanyak 36 OPD, yakni:

No	Badan Publik	No	Badan Publik
1	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel	20	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel	21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Sulsel
4	Dinas Perindustrian Prov. Sulsel	22	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sulsel
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel	23	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulsel
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sulsel	24	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulsel
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	25	Biro Umum Setda Prov. Sulsel
8	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulsel	26	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sulsel
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov. Sulsel	27	Dinas Sosial Prov. Sulsel
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulsel	28	Inspektorat Prov. Sulsel
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulsel
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel	30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel
13	RSUD Haji Makassar Prov. Sulsel	31	Biro Organisasi Setda Prov. Sulsel
14	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	32	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel	33	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sulsel
16	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel	34	Dinas Kehutanan Prov. Sulsel
17	Biro Hukum Setda Prov. Sulsel	35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel
18	Dinas Perdagangan Pemerintah Prov. Sulsel	36	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulsel

 Monev Pemerintah Kab/Kota

Berdasarkan 6 indikator penilaian pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri, dipadu dengan inovasi, kolaborasi dan Komitmen yang telah dilakukan badan publik terkait pelayanan informasi publik saat presentasi serta verifikasi faktual, di tahun 2022 badan publik tingkat Kabupaten/Kota yang meraih kategori Informatif hanya 1 Badan Publik, 2 Badan Publik Menuju Informatif, 8 Badan Publik Cukup Informatif, 3 Badan Publik Kurang Informatif dan 10 Badan Publik yang Tidak Informatif.

No	Badan Publik	HASIL MONEV			TOTAL NILAI MONEV	KATEGORI
		NILAI SAQ	NILAI PRESENTASI (Inovasi, Kolaborasi Dan Komitmen)	Nilai Verifi kasi Fakt ual		
1	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	74,60	14,64	4,60	93,84	INFORMATIF
2	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	64,48	12,13	4,60	81,21	MENUJU INFORMATIF
3	Pemerintah Kota Parepare	62,44	13,31	4,40	80,15	MENUJU INFORMATIF
4	Pemerintah Kabupaten Pinrang	61,20	12,02	4,60	77,82	CUKUP INFORMATIF
5	Pemerintah Kabupaten Sidrap	54,32	11,41	3,75	69,48	CUKUP INFORMATIF
6	Pemerintah Kabupaten Maros	51,60	12,43	4,75	68,78	CUKUP INFORMATIF
7	Pemerintah Kabupaten Sinjai	50,60	11,95	4,35	66,90	CUKUP INFORMATIF
8	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	47,40	12,83	3,75	63,98	CUKUP INFORMATIF
9	Pemerintah Kabupaten Pangkep	44,96	12,00	4,1	61,06	CUKUP INFORMATIF
10	Pemerintah Kabupaten Luwu	44,40	11,76	3,90	60,06	CUKUP INFORMATIF
11	Pemerintah Kabupaten Soppeng	43,32	11,96	4,75	60,03	CUKUP INFORMATIF
12	Pemerintah Kota Makassar	34,48	8,83	-	43,31	KURANG INFORMATIF
13	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	36,52	6,55	-	43,07	KURANG INFORMATIF
14	Pemerintah Kabupaten Wajo	33,72	7,31	-	41,03	KURANG INFORMATIF
15	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	28,08	10,91	-	38,99	TIDAK INFORMATIF
16	Pemerintah Kabupaten Bone	30,72	8,05	-	38,77	TIDAK INFORMATIF
17	Pemerintah Kabupaten Gowa	30,32	7,19	-	37,51	TIDAK INFORMATIF
18	Pemerintah Kabupaten Enrekang	23,12	7,77	-	30,89	TIDAK INFORMATIF
19	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	24,72	5,43	-	30,15	TIDAK INFORMATIF
20	Pemerintah Kabupaten Barro	21,08	7,14	-	28,22	TIDAK INFORMATIF
21	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	19,48	6,23	-	25,71	TIDAK INFORMATIF
22	Pemerintah Kota Palopo	18,92	6,02	-	24,94	TIDAK INFORMATIF
23	Pemerintah Kabupaten Selayar	11,84	TIDAK PRESENTASI	-	11,84	TIDAK INFORMATIF
24	Pemerintah Kabupaten Takalar	4,56	TIDAK PRESENTASI	-	4,56	TIDAK INFORMATIF



Berbeda pada tahun 2021 untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota hanya satu yang tidak mengembalikan kuesioner sementara di tahun 2022 dari semua 24 Kabupaten mengembalikan dan mengisi *form* Kuisisioner.

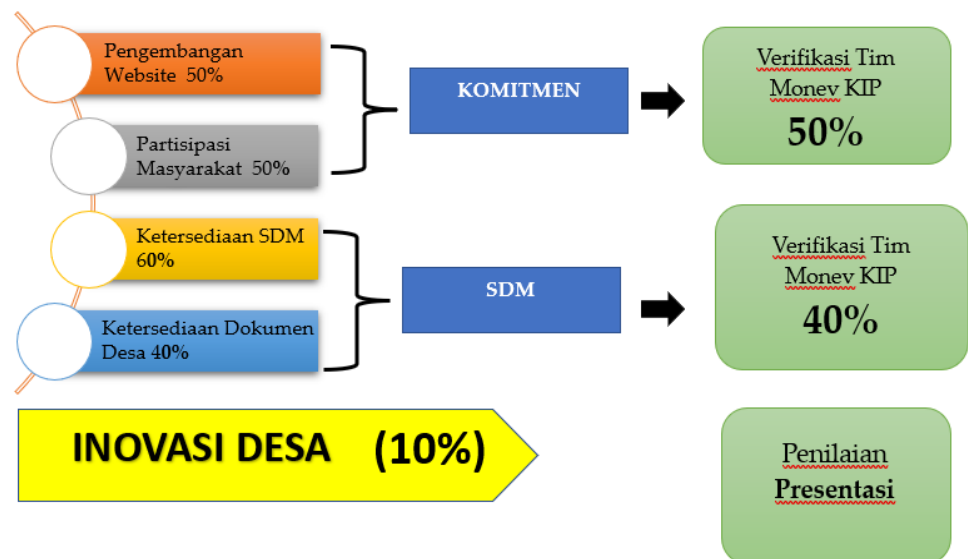
Monev Badan Publik Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan kepada setiap Badan Publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik dengan efisien agar dapat diakses dengan mudah oleh publik. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam rangka meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintah yang terbuka,partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta memastikan masyarakat memiliki kontribusi besar dalam hal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu untuk mengetahui sejauhmana informasi publik di desa bisa diakses oleh masyarakat melalui monitoring dan memberikan apresiasi terhadap langkah desa dalam melakukan pelayanan dan menyediakan informasi.

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk kedua kalinya melakukan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Desa dan memberikan apresiasi terhadap langkah desa dalam melakukan pelayanan dan menyediakan informasi. Untuk Penilaiannya menggunakan Kuesioner yang

indikatornya terdiri dari :



Hasil dari penilaian 3 (tiga) indikator dari pengisian SAQ dan Presentasi yang dilakukan oleh Badan Publik Desa akan memberikan gambaran klasifikasi keterbukaan informasi Badan Publik tersebut. Untuk gambaran klasifikasi penilaian keterbukaan informasi publik dari perolehan penilaian, diklasifikasikan dalam 5 kategori sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Informatif, rentang Nilai | (90 - 100) |
| 2. Menuju Informatif Nilai | (80 - 89,99) |
| 3. Cukup Informatif Nilai | (60 - 79,9) |
| 4. Kurang Informatif Nilai | (40 - 59,9) |
| 5. Tidak Informatif Nilai | (<39,9) |

Berbeda dari tahun 2021 yang mana setiap Kabupaten hanya merekomendasikan 1 desa setiap Kabupaten, ditahun 2022 setiap kabupaten diminta untuk merekomendasikan 2 desa terbaik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari 2 desa yang direkomendasikan hanya akan dipilih satu desa yang memperoleh nilai tertinggi hasil verifikasi kuesioner untuk mengikuti tahap presentasi .

Dari 22 Kabupaten hanya 2 kabupaten yang tidak mengirimkan rekomendasi desa untuk mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik yaitu Kabupaten Wajo dan Kabupaten Barru.

Jumlah Badan Publik Desa yang direkomendasikan oleh setiap Kabupaten dan mengisi kuesioner melalui aplikasi e-monev sebanyak 34 Desa yaitu sebagai berikut :

No	Badan Publik	No	Badan Publik
1	Desa Ulaweng Cinnong Kec. Ulaweng, Kab. Bone	18	Desa Pattaneteang Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng
3	Desa Sampano Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu	19	Lembang Buntudatu Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja
2	Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidrap	20	Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu, Kab. Selayar
4	Desa Panaikang Kec. Minasatene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan	21	Desa Saukang Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
5	Desa Balantang Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur	22	Lembang Parinding, Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara
6	Desa Topejawa Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar	23	Desa Karueng Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
7	Desa Lempangang Kec. Bajeng, Kab. Gowa	24	Desa Kambuno Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumpa
8	Desa Bira Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba	25	Desa Bangkalaloe Bontoramba, Kab. Jeneponto
9	Desa Salulemo Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara	26	Lembang Banga Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja
10	Desa Pincara Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara	27	Desa Samaulue Kec Lasinrang, Kab. Pinrang
11	Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang	28	Desa Tenrigangkae Kec. Mandai, Kab. Maros
12	Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar	29	Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur
14	Desa Barania Kec. Sinjai Barat, Kab. Sinjai	30	Desa Maccile Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
15	Desa Bontosunggu kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selaya	31	Desa Mallari Kec. Awangpone, Kab. Bone
16	Desa Arungkeke Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto	32	Desa Biangloe Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng
13	Desa Pa'bentengang Kec. Marusu Kab. Maros	33	Desa Malimpung Kec. Patampanua, Kab. Pinrang
17	Desa Tellulimpoe Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng	34	Desa Tindalun Kecamatan Angareja, Kab. Enrekang

Sementara yang ikut presentasi hanya 15 desa atau 75%, dari 20 Desa yang mengisi atau mengembalikan SAQ, berdasarkan hasil nilai verifikasi SAQ dan penyeteroran video tetang pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik dan inovasi terkait hal tersebut. Adapun 15 desa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Badan Publik
1.	Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto
2.	Desa Balantang Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
3.	Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
4.	Desa Bira Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba
5.	Desa Bontosunggu kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar
6.	Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap

7.	Desa Lempangang Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa
8.	Desa Pa'bentengang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros
9.	Desa Panaikang Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
10.	Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng
11.	Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara
12.	Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu
13.	Desa Tellulimpoe Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng
14.	Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
15.	Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone

Berdasarkan indikator penilaian pengisian SAQ dengan presentasi yang telah dilakukan badan publik desa ada 1 badan publik desa yang meraih kategori **Informatif**, 6 badan publik dengan kategori **Menuju Informatif**, 7 badan publik desa yang meraih kategori Cukup Informatif selebihnya hanya mampu mencapai kategori **Kurang Informatif** sebanyak 4 dan 16 badan publik yang masuk kategori **Tidak Informatif**.

No	Nama Badan Publik	Nilai Monev	Kualifikasi
1	Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	94,42	INFORMATIF
2	Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu	84,60	MENUJU INFORMATIF
3	Desa Ulaweng Cinnong Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone	83,89	MENUJU INFORMATIF
4	Desa Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	82,93	MENUJU INFORMATIF
5	Desa Balantang Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur	82,25	MENUJU INFORMATIF
6	Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar	81,62	MENUJU INFORMATIF
7	Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar	81,49	MENUJU INFORMATIF
8	Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai	78,13	CUKUP INFORMATIF
9	Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba	71,49	CUKUP INFORMATIF
10	Desa Pa'bentengang Kecamatan Marusu Kabupaten Maros	65,15	CUKUP INFORMATIF
11	Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara	61,54	CUKUP INFORMATIF
12	Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	60,65	CUKUP INFORMATIF
13	Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang	61,19	CUKUP INFORMATIF
14	Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kabupaten Takalar	60,83	CUKUP INFORMATIF
15	Desa Pincara Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara	57,78	KURANG INFORMATIF
16	Desa Tellulimpoe Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng	54,92	KURANG INFORMATIF

17	Desa Arungkeke Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto	54,86	KJURANG INFORMATIF
18	Desa Pattaneteang Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng	46,76	KJURANG INFORMATIF
19	Lembang Buntudatu Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja	36,97	TIDAK INFORMATIF
20	Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu, Kab. Selayar	28,13	TIDAK INFORMATIF
21	Desa Saukang Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai	18,86	TIDAK INFORMATIF
22	Lembang Parinding, Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara	20,60	TIDAK INFORMATIF
23	Desa Karueng Kec. Enrekang, Kab. Enrekang	19,75	TIDAK INFORMATIF
24	Desa Kambuno Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba	19,39	TIDAK INFORMATIF
25	Desa Bangkalaloe Bontoramba, Kab. Jeneponto	17,60	TIDAK INFORMATIF
26	Lembang Banga Kec. Rembon, Kab. Tana Toraja	16,69	TIDAK INFORMATIF
27	Desa Samaulue Kec Lasinrang, Kab. Pinrang	6,82	TIDAK INFORMATIF
28	Desa Tenrigangkae Kec. Mandai, Kab. Maros	5,55	TIDAK INFORMATIF
29	Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni, Kab.Luwu Timur	5,33	TIDAK INFORMATIF
30	Desa Maccile Kec. Lalabata, Kab. Soppeng	4,55	TIDAK INFORMATIF
31	Desa Mallari Kec. Awangpone, Kab. Bone	4,55	TIDAK INFORMATIF
32	Desa Biangloe Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng	0,00	TIDAK INFORMATIF
33	Desa Malimpung Kec. Patampanua, Kab. Pinrang	0,00	TIDAK INFORMATIF
34	Desa Tindalun Kecamatan Angareja, Kab. Enrekang	0,00	TIDAK INFORMATIF

Dokumentasi Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2022





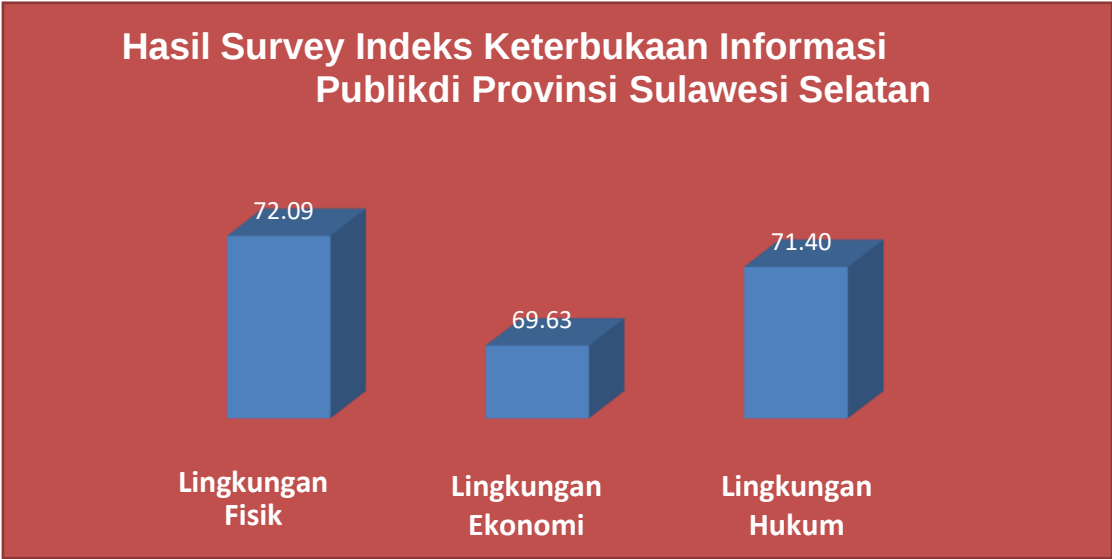
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP)

Untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat provinsi dan nasional, Komisi Informasi melaksanakan survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang menysasar 34 provinsi termasuk Sulawesi Selatan. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, memberikan masukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). Ketiga aspek tersebut dinilai melalui 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi Fisik/Politik, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Hukum yang diturunkan kedalam 20 (dua puluh) indikator dan 85 (delapan puluh lima) pertanyaan.

Hasil survey menunjukkan bahwa dari tiga aspek utama survey Indeks Keterbutkaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 di Sulawesi Selatan, aspek Lingkungan fisik dan politik berada pada skor tertinggi mencapai 72.09 sedangkan Lingkungan Ekonomi meraih skor

terendah yakni 69,63. Aspek Lingkungan Hukum sendiri berapa pada posisi diantara keduanya dengan skor 71,40. Hasil ini merupakan penilaian mandiri dan independen dari 9 (Sembilan) Informan Ahli (AI) terpilih dari latar belakang unsur Pemerintah, unsur dunia usaha dan unsur masyarakat. Gambaran peroleh Skor penilaianinforman ahli dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan secara nasional berada pada posisi sedang dengan perolehan nilai 70,58



 Dokumentasi FGD IKIP 2022

ADVOKASI SOSIALISASI DAN EDUKASI (ASE)

Sejak Undang-undang Keterbukaan Informasi diundangkan pada 30 April 2008 hingga kini sudah hampir berjalan 11 tahun. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang ini apalagi memahami urgensi keterbukaan yang di atur oleh UU-KIP. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menggunakan hak asasi yang dimilikinya untuk mendapatkan informasi publik sebagai wujud partisipasi publik dalam mengembangkan dan mencerdaskan lingkungannya, serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berangkat dari realitas itulah, sehingga program ASE menjadi salah satu program kegiatan yang permanen yang secara massif harus senantiasa di programkan dan diimplementasikan di Komisi Informasi. Prioritas kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang UU-KIP di tahun 2021 ini masih terfokus pada kelompok-kelompok strategis seperti aktifis penggiat masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok terdidik kaum milenial. Selain itu, sosialisasi juga intens dilakukan kepada para pengelola PPID.

Dialog Interaktif dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional.

Dalam rangka memperingati hari Keterbukaan Informasi Nasional Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan dialog interaktif, Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022.

Terlibat dalam Alinasi Masyarakat Untuk Keterbukaan Informasi Publik



Selain kegiatan diatas,sosialisasi dan bimbingan teknis secara tidak langsung juga dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan memenuhi undangan narasumber dari beberapa Badan Publik sebagaimana pada tabel berikut :

NO	HARI / TANGGAL	PEMATERI	MATERI	PELAKSANA	TEMPAT
1	Kamis 13 Januari 2022	Benny Mansjur	Pertemuan Pertama : Pendampingan Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik	YASMIB Sulawesi	Hotel Remcy Makassarsar Jl. Boulevard Blok F5 No. 9, Panakukang Makassar
2	Senin 17 Januari 2022	Khaerul Mannan	Pertemuan Kedua : Pendampingan Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik	YASMIB Sulawesi	<i>Toraja Room Baruga Lounge</i> Gedung A Lantai I Kantor Gubernur Sulsel
3	Rabu 20 Januari 2022	Andi Tadampali	Pertemuan Ketiga : Pendampingan Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik	YASMIB Sulawesi	<i>Toraja Room Baruga Lounge</i> Gedung A Lantai I Kantor Gubernur Sulsel
4	Rabu 26 Januari 2022	Fauziah Erwin	Pertemuan Ketiga : Pendampingan Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik	YASMIB Sulawesi	<i>Toraja Room Baruga Lounge</i> Gedung A Lantai I Kantor Gubernur Sulsel
5	Kamis 27 Januari 2022	Pahir Halim	Diskusi Awal Tahun Keterbukaan Informasi Publik "Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Sulsel"	YASMIB Sulawesi	Hotel Remcy Makassarsar Jl. Boulevard Blok F5 No. 9, Panakukang Makassar
6	Senin 31 Januari 2022	Pahir Halim	Urgensi Keterbukaan Informasi Publik	BTKLPP Kelas I Makassar	Kantor BTKLPP Kelas I Makassar
7	Selasa 08 Februari 2022	Fauziah Erwin	Bincang-bincang Podcast "Mekanisme Permohonan Informasi Publik & Peran CSO Mendorong KIP di Sulawesi Selatan"	JURnal Celebes	Kantor JURnal Celebes Makassar
		Andi Tadampali			
8	Kamis 24 Februari 2022	Pahir Halim	Workshop Advokasi Keterbukaan Informasi Publik "Regulasi terkait Akses Informasi Publik"	Institute of Community Justice (ICJ)	Red Corner Jl. Yusuf Dg. Ngawing Makassar
9	Jumat 25 Februari 2022	Benny Mansjur	Peran Komisi Informasi dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Sektor Sumber Daya Alam	JURnal Celebes	Zoom Meeting
10	Senin 07 Maret 2022	Benny Mansjur	Sosialisasi "Penyusunan DIP dan Pengujian Konsekuensi"	Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng	<i>Canephora Café & Garden</i> Watansoppeng Kabupaten Soppeng

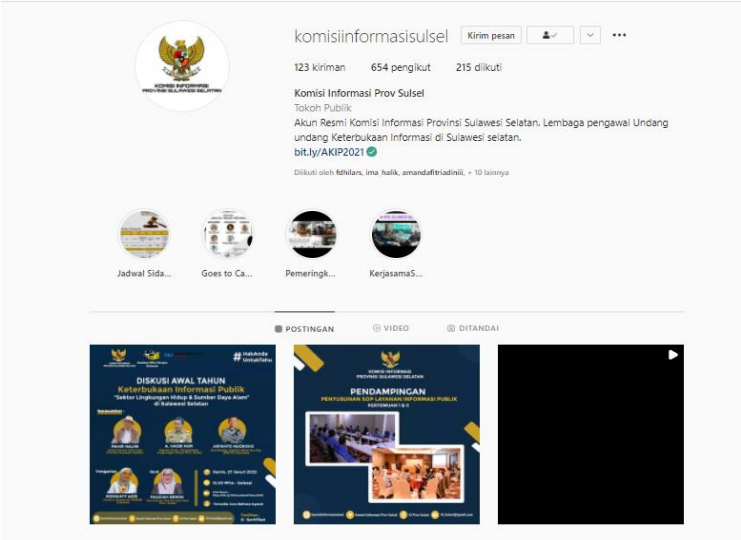
		Fauziah Erwin	Sosialisasi "Urgensi Keterbukaan Informasi Publik.Diskusi Ruang Publik"		
11	Sabtu 28 Mei 2022	Khaerul Mannan	Diskusi Ruang Publik "Keterbukaan Informasi Publik Untuk Pemerintah Yang Inovatif"	Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)	Zoom Meeting
12	Kamis 09 Juni 2022	Fauziah Erwin	Penguatan Tata Kelola PPID "Pembuatan SOP dan Pengenalan Penulisan Jurnalistik Bagi PPID - SKPD"	Dinas Kominfo Kota Makassar	Four Point By Sheraton Hotel Jl. Andi Djemma No. 130 Makassar
13	Rabu 15 Juni 2022	Benny Mansjur	Bimbingan Teknis PPID Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan	Hotel Golden Tulip Essential Jl. Sultan Hasanuddin No. 43 Makassar
14	Sabtu 18 Juni 2022	Khaerul Mannan	<i>Foccus Discussion Group</i> (FGD) "Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat dalam Program JKN"	BPJS Kesehatan Kedeputan Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku	Four Point By Sheraton Hotel Jl. Andi Djemma No. 130 Makassar
15	Rabu 22 Juni 2022	Andi Tadampali	Workshop Keterbukaan Informasi Publik Melalui PPID OPD Terkait di Kota Makassar	Institute of Community Justice (ICJ)	Hotel The One Jl. Gunung Latimojong No.115 Makassar
16	Sabtu 02 Juli 2022	Pahir Halim	Diklat Kehumasan Pejabat Humas Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sulsel "SOP Keterbukaan Informasi Publik"	Rakyat Institut	Hotel Gammara Jl. H. M. Daeng Patompo, Metro Tanjung Bunga Makassar
17	Senin 04 Juli 2022	Benny Mansjur	Sosialisasi "Keterbukaan Informasi Publik pada PPID"	Dinas Kominfo Kabupaten Sidenreng Rappang	Aula Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap Jl. Harapan Baru Blok B No 15, Kab. Sidrap
18	Senin 20 Juli 2022	Fauziah Erwin	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID "Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Penyusunan SOP Layanan Informasi Publik"	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Hotel Gammara Makassar Jl. H. M. Daeng Patompo, Metro Tanjung Bunga Makassar
		Benny Mansjur	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID "Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa"		
	Selasa 21 Juli 2022	Pahir Halim	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID "Mekanisme Uji Konsekuensi"	Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan	Hotel Gammara Makassar Jl. H. M. Daeng Patompo, Metro Tanjung Bunga Makassar
		Khaerul Mannan	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik"		
19	Selasa 26 Juli 2022	Khaerul Mannan	Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Bantaeng	Dinas Kominfo Kabupaten Bantaeng	Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng

20	Rabu 10 Agustus 2022	Pahir Halim	"Memahami Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan"	Dinas Kominfo Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto
21	Senin 15 Agustus 2022	Andi Tadampali	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPID "Urgensi Pengujian Konsekuensi Badan Publik"	Dinas Kominfo Kabupaten Tana Toraja	Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tana Toraja Jl. Nusantara, Makale
22	Selasa 27 September 2022	Fauziah Erwin	Diseminasi Peta Potensi dan Peluang Investasi "Fungsi Komisi Informasi untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa"	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel	Hotel Dalton Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16 No. 2 Makassar
24	Kamis 29 September 2022	Pahir Halim	Foccus Discussion Group (FGD) "Standar Pelayanan Informasi Publik"	JURnal Celebes	Hotel Remcy Makassarsar Jl. Boulevard Blok F5 No. 9, Panakukang Makassar
25	Kamis 20 Oktober 2022	Benny Mansjur	Pelatihan Pelayanan Prima dan PPID "Peran dan Fungsi PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik"	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	Hotel Rinra Makassar Jl. H. M. Daeng Patompo No. 2, Metro Tanjung Bunga Makassar
26	Selasa 15 November 2022	Khaerul Mannan	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Kabupaten Wajo	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	Ruang Aula Bappelitbangda Kabupaten Wajo
27	Selasa 29 November 2022	Khaerul Mannan	Seminar Hukum Kampus Tanpa Kekerasan Seksual "Keterbukaan Informasi Publik tentang Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak di Instansi Pemerintah"	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Parepare	Auditorium Universitas Muhammadiyah Kota Parepare
28	Rabu 14 Desember 2022	Pahir Halim	Diskusi Publik "Menyoal Verfak Parpol Calon Peserta Pemilu 2024 Sulsel"	Forum Informasi & Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-ORNOP) Sulawesi Selatan	Zoom Meeting
29	Rabu 21 Desember 2022	Fauziah Erwin	Sosialisasi Digitalisasi Informasi Publik untuk Mewujudkan Badan Publik Terbuka Kabupaten Luwu Timur. "Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PerKI SLIP 1/2021 tentang Standar	PPID Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Gedung Wanita Simpursiang Kota Malili Kabupaten Luwu Timur

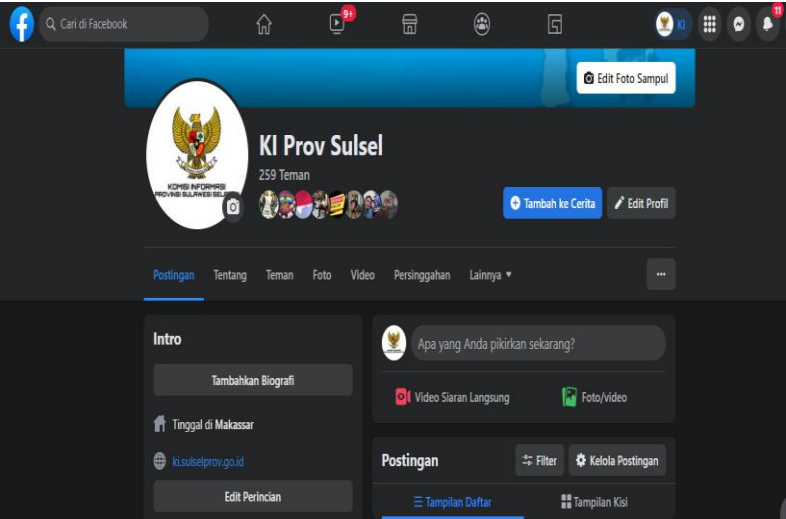
30			Layanan Informasi Publik dan PerKI 1/2022 tentang Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik"		
		Benny Mansjur	Sosialisasi Digitalisasi Informasi Publik untuk Mewujudkan Badan Publik Terbuka Kabupaten Luwu Timur. "Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah"		

Pengelolaan Media Sosial (Medsos)

Media Sosial Komisi Informasi Pusat terdiri dari Facebook dan Instagram, yang meng-update sejumlah kegiatan dan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.



Instagram Komisi Informasi Prov. Sulsel



Facebook Komisi Informasi Prov. Sulsel

PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI DESA

EVALUASI DAN APRESIASI DESA DALAM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI



Desa Ganra Soppeng 10 Terbaik Nasional Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi berkomitmen terus mendorong keterbukaan informasi publik hingga level desa. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan tiga Desa Informatif di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil MONEV Keterbukaan Informasi Publik Desa tahun 2021 di Sulawesi Selatan untuk ikut berkompetisi di ajang nasional Evaluasi dan Apresiasi Desa Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Tiga desa tersebut, yaitu Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan Desa Senga Selatan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Sebanyak 90 Desa terbaik dari 29 Provinsi yang direkomendasikan oleh Komisi Informasi Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut mengikuti kegiatan ini

Tahapan kegiatan ini diantaranya adalah pengisian kuesioner, selanjutnya dilakukan verifikasi kuesioner, dan visitasi Tim Penilai yang merupakan unsur Komisi Informasi Pusat, Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Proses pembinaan yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Desa di Sulsel berbuah manis. Setelah melalui rangkaian proses penilaian, Tim Penilai menetapkan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng menjadi satu satunya Desa yang terpilih dari wilayah Sulawesi dan menjadi 10 terbaik nasional Desa Transparan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Sebanyak 89 Pemerintah Desa dari 29 Provinsi yang direkomendasikan oleh Komisi Informasi Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa turut mengikuti setiap kegiatan ini. Tahapan kegiatan ini diantaranya adalah pengisian kuesioner, selanjutnya dilakukan verifikasi.

No	Provinsi	Desa
1	Bali	Duda Timur
2	Kalimantan Barat	Sejiram Titian Kuala
3	Jawa Barat	Panjalu Cangkingan
4	Kalimantan Timur	Tengin Baru Padang Jaya Loa Duri Ilir
5	Lampung	Pulung Kencana Tulus Rejo
6	Riau	Pulau Gadang Pematang Berangan
7	Sumatera Barat	Bunga Pasang Salido
8	Maluku	Hitu Lama
9	Jambi	Tambang Emas
10	Bangka Belitung	Sekar Biru Gadung
11	Banten	Talagasari Cikande Permai Bandung Bayah Barat
12	Sumatera Utara	Bangkudu Pulau Gambar
13	Bengkulu	Tanjung Eran Karang Jaya
14	Nusa Tenggara Barat	Peresak Senggigi
15	Jawa Timur	Kendalbulur Paringan Sidomulyo Grogol Ploso
16	Sulawesi Tengah	Kalukubula Malino
17	Sulawesi Selatan	Kasimbar Selatan Bana Ganra Senga Selatan
18	Kalimantan Selatan	Kampung Baru

19	Maluku Utara	Kampung Makian Soasio Guaemaadu Balbar Maitara Tengah
20	Gorontalo	Pilohayanga Hutadaa
21	Aceh	Babussalam Peunyeurat Lam Bheu Merah Mersa Ujong Batee
22	Sulawesi Barat	Binanga Salupangkang Beru - Beru Panetean Rea
23	Nusa Tenggara Timur	Detusoko Barat Bokong Kabuna Naitimu Kakanjuk Oenggaut Podenura Nayu Baya Lamawalang Tebara Siru Batajawa Makata Kaeri
24	Kalimantan Tengah	Natai Raya
25	Sulawesi Tenggara	Mabulugo Lambuno Terapung Wapia-Pia Cialam Jaya
26	Sumatera Selatan	Bukit Jaya Surya Adi Muara Gula Baru Batumarta I Sido Mulyo
27	Kalimantan Utara	Silva Rahayu Pulau Sapi Bukit Aru Sambungan Selatan

28	Jawa Tengah	Sendang Sari Banyubiru Jatilor
29	Yogyakarta	Sendang Sari Dengok

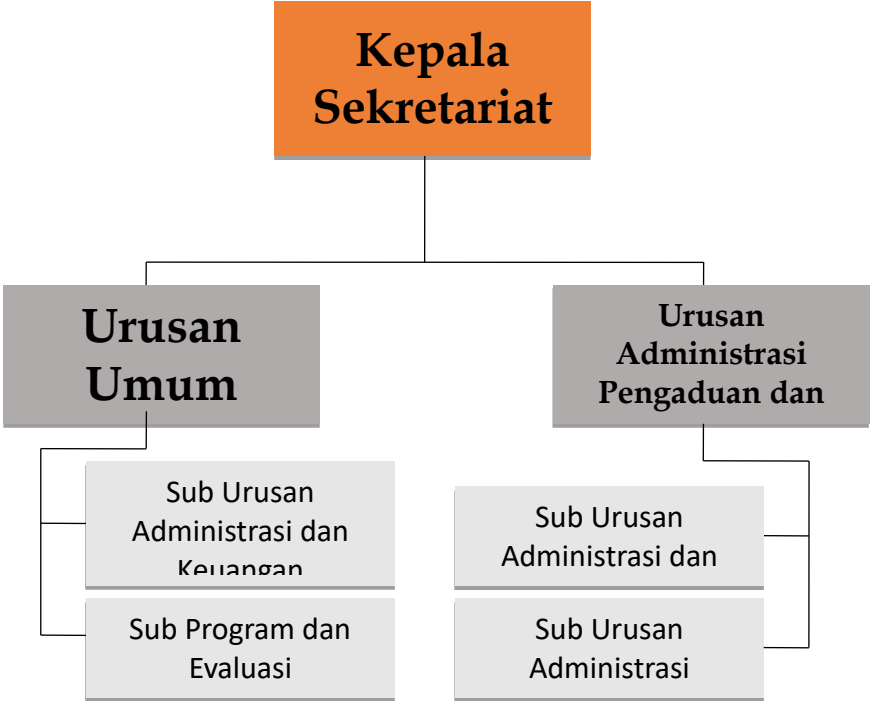
Keterbukaan Informasi Publik. 10 Desa tersebut mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur untuk menjadi nominator Desa Transparan. Adapun Pemerintah Desa yang diberikan apresiasi sebagai Desa Transparan yaitu Desa Sendangsari (Jawa Tengah), Desa Duda Timur (Bali), dan Desa Maitara Tengah (Maluku Utara).

No	Provinsi	Desa
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sendangsari
2	Sumatera Barat	Bunga Pasang Salido
3	Jawa Timur	Desa Ploso
4	Kalimantan Barat	Titian Kuala
5	Sumatera Selatan	Bukit Jaya
6	Bali	Duda Timur
7	Nusa Tenggara Timur	Desa Bokong
8	Sulawesi Selatan	Ganra
9	Kalimantan Timur	Tengin Baru
10	Maluku Utara	Maitara Tengah

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah unsur pendukung administratif keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Secara teknis operasional dan secara administratif, sekretaris bertanggung jawab kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi dua bagian, yakni: (i) *Bagian Umum dan Keuangan*; dan (ii) *Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi*; Struktur Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Sulawesi Selatan Nomor :117 Tahun 2017 tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. berikut Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Prov. Sulsel



Keuangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022

Keuangan merupakan hal yang sangat penting guna menjalankan roda organisasi, karena keuangan dalam organisasi tersebut digunakan untuk menjalankan program-program kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keuangan dalam suatu lembaga harus diatur sesuai dengan besaran yang sudah direncanakan sejak dulu. Hal ini agar tidak ada kesalahan dalam melakukan penganggaran. Anggaran Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun selalu berubah. Dan perubahan bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

No.	Tahun Anggaran	Nominal
1.	Tahun 2011	Rp. 650.000.000,00
2.	Tahun 2012	Rp. 1.500.000.000,00
3.	Tahun 2013	Rp. 1.936.000.000,00
4.	Tahun 2014	Rp. 2.000.000.000,00
5.	Tahun 2015	Rp. 1.504.500.000,00
6.	Tahun 2016	Rp. 2.540.800.000,00
7.	Tahun 2017	Rp. 2.304.980.000,00
8.	Tahun 2018	Rp. 1.145.800.000,00
9.	Tahun 2019	Rp.1.180.000.000,00
10.	Tahun 2020	Rp.1. 229.046.800,00
11.	Tahun 2021	Rp. 1.746.685.712,00
12	Tahun 2022	Rp. 1.398.053.900,00

Anggaran tersebut khususnya Anggaran Tahun 2022 dipergunakan untuk:

KEGIATAN	ANGGARAN
BELANJA OPERASI	1.790.072.096
Belanja Barang dan Jasa	1790.072.096
Belanja Barang Pakai Habis	352.303.300

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kosntruksi	351.303.300
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikas	2.400.000
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	85.454.400
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	61.178.900
- Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Souvenir/ Cendera Mata	5.000.000
- Belanja Makan dan Minum Rapat	160.450.000
- Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	25.200.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.120.000	10.120.000
Belanja Jasa	884.832.996
Belanja Jasa Kantor	875.481.024
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.700.000
- Belanja jasa Tenaga Administrasi	132.000.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.990.512
- Belanja Jasa Tenaga Supir (1 Orang)	37.990.512
- Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Gaji Komisioner)	528.000.000
- Ketua (1 Orang) / Orang = 9.200.000	110.000.000
- Wakil Ketua (1 Orang) / Orang = 9.000.000	108.000.000
- Anggota (3 Orang) / Orang = 8.600.000	309.600.000
- Belanja Jasa Penyelenggara Acara	50.000.000
- Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film dan Pemetretan	40. 800.000
- Belanja Iuran Jaminan /Asuransi (Non Asn dan Tenaga Supir)	9.351.972

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pemeliharaan Peralatan Komputer)	7.800.000
- Belanja Perjalanan Dinas	523.455.800
- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Plakat)	22.680.000
- Belanja Modal Alat Kantor	6.070.000

Dari total anggaran diatas yang terealisasi ditahun 2022 sebesar 90,56 %.

Untuk mendukung kinerja Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan maka Komisioner diberikan honorarium perbulan dengan besaran dari tahun ketahun diuraikan sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH HONORARIUM		
	KETUA	WAKIL KETUA	ANGGOTA
2011	4.500.000	4.250.000	4.000.000
2012	4.500.000	4.250.000	4.000.000
2013	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2014	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2015	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2016	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2017	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2018	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2019	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2020	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2021	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2022	9.200.000	9.000.000	8.600.000
2023	9.200.000	9.000.000	8.600.000

ADMINISTRASI SURAT – MENYURAT

Tertib administrasi merupakan suatu syarat bagi lembaga, karena adanya system administasi itu bisa mengerti tugas atau tupoksi masing-masing pegawai di dalam lembaga tersebut. Surat merupakan salah satu administrasi yang memberikan peran penting terhadap eksistensi lembaga, karena surat merupakan alat komunikasi antar lembaga. Jadi

surat masuk dan surat keluar harus dijaga dan didokumentasikan dengan rapih.

Berikut jumlah surat masuk dan surat keluar Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022.

No	TAHUN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR UMUM DAN PSI
1	2022	54	260

PENUTUP

REKOMENDASI

Terdapat tantangan dalam pelaksanaan program & kegiatan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi guna perbaikan di masa mendatang :

1. Dibutuhkan penambahan SDM, yakni Tenaga Ahli untuk mengisi posisi panitera agar proses Penyelesaian Sengketa Informasi dapat terlaksana secara tepat waktu dan menghasilkan putusan yang berkualitas.
2. Mendorong terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan pelaksanaan layanan informasi publik yang berkualitas di seluruh Badan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kelembagaan yang tangguh dan profesional sehingga hak masyarakat memperoleh informasi terpenuhi melalui skema penganggaran yg mendukung pencapaian kinerja Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yg bekerja secara mandiri dan independen..

“

Salam Transparansi

”



LAMPIRAN



Sub Kegiatan		: 2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Kota Makassar / Luar Makassar				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Persentase Sengketa Informasi Yang Diselesaikan				90 %
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.790.072.096
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.790.072.096
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp351.303.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp351.303.300
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp2.400.000
	[#]					
	[-]					
	Pengadaan Papan Nama Spesifikasi :	4 Buah	Unit	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi					Rp1.500.000
	[#]					
	[-]					
	Softbox (lighting) Spesifikasi : Lamp Holder 4 Socket Softbox with Light Stand Kit 3 Isi Paket [3x] 4-Lamp Holder with Softbox (60x60cm) [3x] Alumunium Light Stand 200 [1x] Boom Arm Kit 145 cm	1 Unit	Unit	1.500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp85.454.400
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Cokelat Ukuran Sedang	35 Pak	Pak	14.500	0	Rp507.500
	Amplop Spesifikasi : Prima PLS 90 / Sinar 90	24 Dos	Dos	21.500	0	Rp516.000
	Ballpoint Pilot Spesifikasi : Ballliner	20 Lusin	Lusin	212.500	0	Rp4.250.000
	Ballpoint Snowman Spesifikasi : V-2	12 Lusin	Lusin	20.700	0	Rp248.400
	Cutter Spesifikasi : 2 Pisau NT Besar	15 Buah	Buah	31.000	0	Rp465.000
	Goody bags Spesifikasi :	200 Buah	Buah	15.000	0	Rp3.000.000
	Isi Staples Spesifikasi : Eltona No. 10	24 Dos	Dos	33.500	0	Rp804.000
	Karet Penghapus Pensil Spesifikasi : Pensil	11 Buah	Buah	3.500	0	Rp38.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas NCR Folio Spesifikasi : Warna	40 Rim	Rim	75.000	0	Rp3.000.000
	Map Ordner Spesifikasi : Bantex	40 Buah	Buah	39.000	0	Rp1.560.000
	Seminar Kit Spesifikasi :	190 Buah	Kit	250.000	0	Rp47.500.000
	Sinar Dunia Folio Spesifikasi : (F4) 70 gsm	80 Rim	Rim	64.000	0	Rp5.120.000
	Sinar Dunia Kwarto Spesifikasi : (A4s) 70 gsm	20 Rim	Rim	57.500	0	Rp1.150.000
	Sinar Dunia Kwarto Spesifikasi : (QS) 70 gsm	75 Rim	Rim	57.000	0	Rp4.275.000
	Spidol White Board Spesifikasi : Snowman BG-12	15 Batang	Batang	15.000	0	Rp225.000
	Stapler Spesifikasi : HD 10	15 Pak	Pak	73.000	0	Rp1.095.000
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : 664 (4 Warna) L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300/L310/L350/ L355/L360/L365/L380/L385/L405/L485/L550/L555/ L565/L1300	90 Botol	Botol	130.000	0	Rp11.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp61.178.900
	[#]					
	[-]					
	Baju Kaos Oblong Spesifikasi : Panitia/Peserta (all size)	60 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp6.000.000
	Baliho Spesifikasi : Bercetak Logo Ukuran 6 M x 3 M	26 Lembar	Lembar	500.000	0	Rp13.000.000
	Belanja Cetak laporan,brosur/Leaflet Izin dan banner Spesifikasi : Untuk Pendistribusian ke Stakeholder	300 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp900.000
	Bingkai/Frame Spesifikasi :	52 Buah	Buah	50.000	0	Rp2.600.000
	Cetak Foto Spesifikasi : Ukuran 3 R - 10 R	60 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp180.000
	Cetak Kertas Kop Spesifikasi : Gubernur HVS 70 gr	12 Rim	Rim	200.000	0	Rp2.400.000
	Cetak Map Spesifikasi : Batik	200 Buah	Buah	17.500	0	Rp3.500.000
	Cetak Map Spesifikasi : Berwarna Logo Lambang Daerah	202 Buah	Lembar	15.000	0	Rp3.030.000
	Cetak Piagam Spesifikasi : Ukuran A4 dan A5	50 Lembar	Lembar	80.000	0	Rp4.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : L: 1 Meter x P : 5 Meter	5 Lembar	Lembar	360.000	0	Rp1.800.000
	Jilid Spesifikasi : Spiral	100 Buku	Buku	50.000	0	Rp5.000.000
	Penggandaan /Foto Copy Spesifikasi :	52563 Lembar	Lmbar	300	0	Rp15.768.900
	Standing banner Spesifikasi : standing banner	6 Buah	buah	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp5.000.000
	[#]					
	[-]					
	Plakat Spesifikasi : Fiber glass	25 Buah	Buah	200.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp160.450.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Dos	350 Dos	Dos	48.000	0	Rp16.800.000

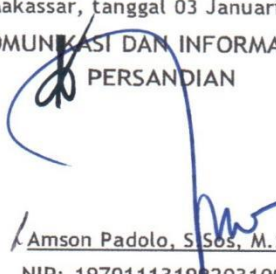
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	FullBoard Spesifikasi : Rapat Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya dalam Wilayah Provinsi	95 Orang	Orang/ Hari	750.000	0	Rp71.250.000
	FullDay Spesifikasi : Rapat Di luar Gedung Pemerintah atau Tempat lainnya dalam Wilayah Provinsi	200 Orang / Hari	Orang/ Hari	320.000	0	Rp64.000.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Di Lingkup OPD Yang Bersangkutan	350 Dos	Orang / Kali	24.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.200.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Dos	350 Dos	Dos	48.000	0	Rp16.800.000
	Snack Dos Spesifikasi : Umum	350 Dos	Orang	24.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp10.120.000
	[#]					
	[-]					
	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) (LENGAN PENDEK) Spesifikasi : PEJABAT ESELON 3	6 Pasang	Orang/ Pasang	1.320.000	0	Rp7.920.000
	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) (LENGAN PENDEK / LENGAN PANJANG) Spesifikasi : PEJABAT ESELON 1 DAN 2	1 Pasang	Orang/ Pasang	2.200.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp884.832.996
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp875.481.024
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.700.000
	[#]					
	[-]					
	Honor Narasumber Pejabat Eselon II kebawah Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	OJ	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Narasumber Pembahas/Pemateri/Pemakalah/Pembahas Utama Berstatus Non PNS Spesifikasi : Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus	2 Orang x 3 Kali x 2 Jam	Orang/ Jam	1.200.000	0	Rp14.400.000
	Narasumber Pembahas/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 3 Kali	Orang/ Kali	700.000	0	Rp2.100.000
	Narasumber Pembahas/Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia Berstatus PNS Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang x 3 Kali	Orang/ Kegiatan	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp132.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : SD/Sederajat - SMA/Sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp36.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Strata I/Sederajat - Strata III/Sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	2.000.000	0	Rp96.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp65.990.512
	[#]					
	[-] Kegiatan Monev Peningkatan KI					
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tim Teknis	7 Orang x 4 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp28.000.000
	[-] Tenaga Ahli Komunikasi Komisi Informasi					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : S1	1 Orang x 12 Bulan	Orang /Bulan	3.165.876	0	Rp37.990.512
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp37.990.512
	[#]					
	[-] Tenaga Supir Ketua Komisi Informasi (1Orang)					
	Belanja Jasa Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Spesifikasi : Sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP)	12 Bulan	Orang / Bulan	3.165.876	0	Rp37.990.512
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp528.000.000

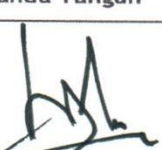
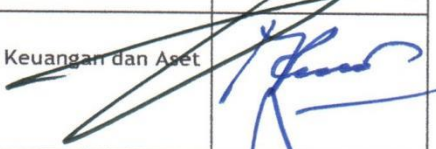
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-] Anggota Komisi Informasi 3 Orang					
	Anggota Komisi Informasi Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.600.000	0	Rp309.600.000
	[-] Ketua Komisi informasi 1 Orang					
	Ketua Komisi informasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.200.000	0	Rp110.400.000
	[-] Wakil Ketua Komisi Informasi 1 Orang					
	Wakil Ketua Komisi Informasi Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.000.000	0	Rp108.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp50.000.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Event Oranganizer (EO) Spesifikasi :	1 Paket	Kegiataniatan	50.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp40.800.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Dokumentasi Advetorial Spesifikasi : Media Online	1 Kali	Per Bulan	5.800.000	0	Rp5.800.000
	KORAN FAJAR Spesifikasi : SPESIFIKASI : 1/4 HALAMAN	2 Eksemplar	EKSEMPLAR	7.500.000	0	Rp15.000.000
	KORAN TRIBUN TIMUR Spesifikasi : SPESIFIKASI : 1/4 HALAMAN	2 Eksemplar	EKSEMPLAR	5.000.000	0	Rp10.000.000
	SUARA CELEBES FM Spesifikasi : Spesifikasi : Siaran Langsung	2 Per Tayang	Tayang	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp9.351.972
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp8.239.620
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan 4%	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	80.000	0	Rp1.920.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan 4%	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp4.800.000
	[-] Tenaga Supir Ketua Komisi Informasi (1Orang)					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Alih Daya (Outsourcing) Spesifikasi : 3.165.876 X 4%	12 Bulan	Bulan	126.635	0	Rp1.519.620
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp494.376
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : JKK Sebesar 0,24 %	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800	0	Rp115.200
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : JKK Sebesar 0,24%	4 Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp288.000
	[-] Tenaga Supir Ketua Komisi Informasi (1Orang)					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Spesifikasi : JKK Gaji Pokok 3.165.876 X 0,24%	12 Bulan	Orang / Bulan	7.598	0	Rp91.176
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp617.976
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : JKM Sebesar 0,30%	2 Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp144.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : JKM Sebesar 0,30%	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.500	0	Rp360.000
	[-] Tenaga Supir Ketua Komisi Informasi (1Orang)					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Spesifikasi : JKM Gaji Pokok 3.165.876 X 0,30%	12 Bulan	Orang / Bulan	9.498	0	Rp113.976
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp6.600.000
	[#]					
	[-]					
	NoteBook / Laptop Spesifikasi : Service Ringan	7 Unit	Unit	600.000	0	Rp4.200.000
	PC (Personal Computer) Spesifikasi : Service Ringan	2 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.200.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	2 Unit	Tahun	600.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp523.455.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp523.455.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp523.455.800
	[#]					
	[-] Eselon III/Gol.IV/Komisi Informasi					
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dari Ibukota Provinsi Ke Kab/Kota (PP) Berdasarkan Kota Tujuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Dekat	15 Kali	Kali	212.000	0	Rp3.180.000
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dari Ibukota Provinsi Ke Kab/Kota (PP) Berdasarkan Kota Tujuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Sedang	20 Kali	Kali	467.200	0	Rp9.344.000
	Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid - 19 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Rapid Test Antigen	30 Kali	Kali	310.000	0	Rp9.300.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol.IV - Sedang	30 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp29.760.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kedudukan/Kota Asal	15 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp2.175.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sedang	15 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.840.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Sedang - (Ekonomi)	15 Orang / Kali	Kali	3.829.000	0	Rp57.435.000
	Satuan Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kab/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Spesifikasi : Jauh	30 Kali	Orang / Kali	375.000	0	Rp11.250.000
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi :	225 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp96.750.000
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Sedang	45 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp23.850.000
	Satuan Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kab/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol.IV	150 Hari	Orang / Hari	500.000	0	Rp75.000.000
	[-] Eselon IV /Gol. III					
	Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid - 19 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Rapid Test Antigen	8 Orang / Kali	Kali	310.000	0	Rp2.480.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol.III - Sedang	12 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp8.760.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kedudukan/Kota Asal	4 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp580.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sedang	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Sedang - (Ekonomi)	4 Orang / Kali	Kali	3.829.000	0	Rp15.316.000
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi :	45 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp19.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Sedang	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp6.360.000
	Satuan Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kab/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol.III	30 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp13.500.000
	[-] Gol. I/ II/ PPPK					
	Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid - 19 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Rapid Test Antigen	16 Orang / Kali	Kali	310.000	0	Rp4.960.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : PNS Gol.I/Gol.II - Sedang	16 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp11.680.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kedudukan/Kota Asal	8 Orang / Kali	Orang / Kali	145.000	0	Rp1.160.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Sedang	8 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp2.048.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Sedang - (Ekonomi)	8 Orang / Kali	Kali	3.829.000	0	Rp30.632.000
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi :	96 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp41.280.000
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Sedang	24 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp12.720.000
	Satuan Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kab/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : PNS Gol.I/Gol.II	64 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp22.400.000
	[-] Pejabat Eselon II					
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dari Ibukota Provinsi Ke Kab/Kota (PP) Berdasarkan Kota Tujuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Jauh	1 Kali	Kali	1.024.600	0	Rp1.024.600
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dari Ibukota Provinsi Ke Kab/Kota (PP) Berdasarkan Kota Tujuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Sedang	1 Kali	Kali	467.200	0	Rp467.200
	Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi :	6 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp2.580.000
	Satuan Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kab/Kota Se Provinsi Sulawesi Selatan Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	4 Hari	Orang / Hari	700.000	0	Rp2.800.000
	Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Provinsi Sulawesi Selatan) Spesifikasi : Pejabat Eselon II.B	6 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp450.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.680.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp22.680.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp22.680.000
	[#]					
	[-]					
	Plakat Spesifikasi :	40 Buah	Buah	567.000	0	Rp22.680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp23.890.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp6.070.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp6.070.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp6.070.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp6.070.000
	[#]					
	[-]					
	Tripod Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.495.000	0	Rp4.495.000
	webcam Logitech Spesifikasi : C925e	1 Unit	Unit	1.575.000	0	Rp1.575.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp17.820.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp17.820.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp17.820.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya					Rp17.820.000
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Website Komisi Informasi & PPID KI Spesifikasi :	1 Unit	Instalasi	17.820.000	0	Rp17.820.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.813.962.096
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp16.076.832.116

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Makassar, tanggal 03 Januari 2022 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  Amson Padolo, S.Sos, M.Si NIP: 197011131992031004 Mengesahkan, PPKD  Drs. Muhammad Rasyid NIP: 196412311992031123			
Januari	Rp745.000.000				
Februari	Rp898.494.505				
Maret	Rp1.532.095.843				
April	Rp2.638.527.232				
Mei	Rp1.982.458.935				
Juni	Rp137.822.143				
Juli	Rp1.584.666.540				
Agustus	Rp1.607.759.501				
September	Rp175.703.843				
Oktober	Rp4.219.373.045				
November	Rp318.482.843				
Desember	Rp236.447.686				
Jumlah	Rp16.076.832.116				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. A. DARMAWAN BINTANG, M.dev. Plg.	196704271993031015	Kepala Bappelitbangda	
2.	Drs. H. MUHAMMAD RASYID	196412311992031123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	ASRUL SANI, SH. M.Si	197503212003121008	Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa	
4.	Hj. ANDI MIRNA, SH	196710061993012002	Kepala Biro Organisasi	